



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN

**NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dan menindaklanjuti hasil koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil perlu disesuaikan kode rekeningnya ;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan juga diperlukannya penyesuaian terhadap Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK), Kegiatan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK), dan Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Permukiman, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu adanya perubahan ;
 - c. bahwa sambil menunggu Perubahan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan Perubahan Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
27. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2020;
38. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E);
39. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 1/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 7/B);
40. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 2/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 8/B);

41. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 9/B);
42. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 4/E) ;
43. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2012 Nomor 1/E).
44. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 3/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 9/B);
45. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 4/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 10/B);
46. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2012 Nomor 10/E);
47. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2014 Nomor 2/E);
48. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);

49. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D);
50. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 14/A);
51. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 13/D) ;
52. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 3/A);
53. Peraturan Walikota Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 25/G);
54. Peraturan Walikota Kota Madiun Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 47/G);

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 1 November 2019 Nomor : 061/12052/SJ tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 2019 Nomor : 061/14089/SJ tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 47/G), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 47/G), diubah sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

- a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 235.504.941.000,00
2. Dana Perimbangan	Rp. 671.425.330.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah	
Yang Sah	<u>Rp. 149.976.033.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.1.056.906.304.000,00

- b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp.424.570.731.577,00
b) Belanja Subsidi	Rp 0,00
c) Belanja Hibah	Rp. 14.862.390.000,00
d) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 21.248.848.000,00
e) Belanja Bagi Hasil	Rp. 0,00
f) Belanja Bantuan	
Keuangan	Rp. 700.062.000,00
g) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 3.562.209.000,00</u>
	Rp.464.944.240.577,00

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp. 86.782.637.920,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.440.432.411.684,00
c) Belanja Modal	<u>Rp. 286.003.429.024,00</u>
	Rp.813.218.478.628,00
Jumlah Belanja	Rp.1.278.162.719.205,00
Defisit	(Rp. 221.256.415.205,00)

c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp.	221.256.415.205,00
2. Pengeluaran	Rp.	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	221.256.415.205,00
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran		
Tahun Berjalan	Rp.	0,00

2. Ketentuan Lampiran I, Lampiran I.a dan Lampiran II diubah sehingga Lampiran I, Lampiran I.a dan Lampiran II secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 30 Januari 2020

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 30 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2020 NOMOR 1/G

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



PEMERINTAH KOTA MADIUN
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	1.056.906.304.000,00	1.056.906.304.000,00	0,00	0,00
1 1	Pendapatan Asli Daerah	235.504.941.000,00	235.504.941.000,00	0,00	0,00
1 1 1	Hasil Pajak Daerah	85.000.000.000,00	85.000.000.000,00	0,00	0,00
1 1 2	Hasil Retribusi Daerah	18.762.439.600,00	18.762.439.600,00	0,00	0,00
1 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	14.934.446.400,00	14.934.446.400,00	0,00	0,00
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	116.808.055.000,00	116.808.055.000,00	0,00	0,00
1 2	Dana Perimbangan	671.425.330.000,00	671.425.330.000,00	0,00	0,00
1 2 1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	67.372.029.000,00	67.372.029.000,00	0,00	0,00
1 2 2	Dana Alokasi Umum	527.916.797.000,00	527.916.797.000,00	0,00	0,00
1 2 3	Dana Alokasi Khusus	76.136.504.000,00	76.136.504.000,00	0,00	0,00
1 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	149.976.033.000,00	149.976.033.000,00	0,00	0,00
1 3 1	Pendapatan Hibah	19.399.600.000,00	19.399.600.000,00	0,00	0,00
1 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	64.366.614.000,00	64.366.614.000,00	0,00	0,00
1 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	65.095.240.000,00	65.095.240.000,00	0,00	0,00
1 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.114.579.000,00	1.114.579.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	1.056.906.304.000,00	1.056.906.304.000,00	0,00	0,00
2	BELANJA	1.278.162.719.205,00	1.278.162.719.205,00	0,00	0,00
2 1	Belanja Tidak Langsung	464.944.240.577,00	464.944.240.577,00	0,00	0,00
2 1 1	Belanja Pegawai	424.570.731.577,00	424.570.731.577,00	0,00	0,00
2 1 4	Belanja Hibah	14.862.390.000,00	14.862.390.000,00	0,00	0,00
2 1 5	Belanja Bantuan Sosial	21.248.848.000,00	21.248.848.000,00	0,00	0,00
2 1 7	Belanja Bantuan Keuangan	700.062.000,00	700.062.000,00	0,00	0,00

Nomor	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2 1 8	Belanja Tidak Terduga	3.562.209.000,00	3.562.209.000,00	0,00	0.00
2 2	Belanja Langsung	813.218.478.628,00	813.218.478.628,00	0,00	0.00
2 2 1	Belanja Pegawai	86.782.637.920,00	86.782.637.920,00	0,00	0.00
2 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	440.432.411.684,00	440.132.411.684,00	(300.000.000,00)	(0.07)
2 2 3	Belanja Modal	286.003.429.024,00	286.303.429.024,00	300.000.000,00	0.10
	Jumlah Belanja	1.278.162.719.205,00	1.278.162.719.205,00	0,00	0,00
	Surplus / Defisit	(221.256.415.205,00)	(221.256.415.205,00)	0,00	0,00
3	PEMBIAYAAN	221.256.415.205,00	221.256.415.205,00	0,00	0.00
3 1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	221.256.415.205,00	221.256.415.205,00	0,00	0.00
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	221.256.415.205,00	221.256.415.205,00	0,00	0.00
	Pembiayaan Netto	221.256.415.205,00	221.256.415.205,00	0,00	0,00
	Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	0.00

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WICOWO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

PEMERINTAH KOTA MADIUN
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : 1 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 Januari 2020

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah /Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	PENDAPATAN	1.056.906.304.000,00	1.056.906.304.000,00	0,00	0,00
4 1	Pendapatan Asli Daerah	235.504.941.000,00	235.504.941.000,00	0,00	0,00
4 1 1	Hasil Pajak Daerah	85.000.000.000,00	85.000.000.000,00	0,00	0,00
4 1 1 01	Pajak Hotel	6.798.000.000,00	6.798.000.000,00	0,00	0,00
4 1 1 01 01	Hotel Bintang	5.583.000.000,00	5.583.000.000,00	0,00	0,00
4 1 1 01 02	Hotel Melati	905.000.000,00	905.000.000,00	0,00	0,00
4 1 1 01 03	Rumah Kos	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	0,00
4 1 1 02	Pajak Restoran	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	0,00	0,00
4 1 1 02 01	Restoran/Rumah Makan	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	0,00	0,00
4 1 1 03	Pajak Hiburan	1.997.000.000,00	1.997.000.000,00	0,00	0,00
4 1 1 03 01	Tontonan Film /Bioskop	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
4 1 1 03 02	Pagelaran Kesenian /Musik /Tari /Busana	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00
4 1 1 03 03	Diskotik	425.000.000,00	425.000.000,00	0,00	0,00
4 1 1 03 06	Permainan Ketangkasan /Bilyard	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00
4 1 1 03 07	Pusat Kebugaran	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
4 1 1 03 08	Pertandingan Olahraga	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
4 1 1 04	Pajak Reklame	1.530.000.000,00	1.530.000.000,00	0,00	0,00
4 1 1 04 01	Reklame Papan /Billboard /Videotron /Megatron	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
4 1 1 04 05	Reklame Suara	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan	20.125.000.000,00	20.125.000.000,00	0,00	0,00
4 1 1 05 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00
4 1 1 05 02	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah /Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4 1 1 06	Pajak Parkir	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	0,00	0,00
4 1 1 06 01	Pajak Parkir	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	0,00	0,00
4 1 1 07	Pajak Air Tanah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
4 1 1 07 01	Pajak Air Tanah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
4 1 1 08	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	20.500.000.000,00	20.500.000.000,00	0,00	0,00
4 1 1 08 01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	20.500.000.000,00	20.500.000.000,00	0,00	0,00
4 1 1 09	Pajak Bumi dan Bangunan	20.500.000.000,00	20.500.000.000,00	0,00	0,00
4 1 1 09 01	Pajak Bumi dan Bangunan	20.500.000.000,00	20.500.000.000,00	0,00	0,00
4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	18.762.439.600,00	18.762.439.600,00	0,00	0,00
4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	7.943.582.000,00	7.943.582.000,00	0,00	0,00
4 1 2 01 02	Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00
4 1 2 01 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.201.000.000,00	3.201.000.000,00	0,00	0,00
4 1 2 01 06	Retribusi Pelayanan Pasar	3.810.190.000,00	3.810.190.000,00	0,00	0,00
4 1 2 01 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	505.000.000,00	505.000.000,00	0,00	0,00
4 1 2 01 09	Retribusi Tera Ulang	61.060.000,00	61.060.000,00	0,00	0,00
4 1 2 01 10	Retribusi Pengendalian Menaua Telekomunikasi	156.332.000,00	156.332.000,00	0,00	0,00
4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	9.316.877.600,00	9.316.877.600,00	0,00	0,00
4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.582.489.600,00	7.582.489.600,00	0,00	0,00
4 1 2 02 04	Retribusi Tempat Khusus Parkir	823.920.000,00	823.920.000,00	0,00	0,00
4 1 2 02 05	Retribusi Rumah Potong Hewan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
4 1 2 02 06	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	860.468.000,00	860.468.000,00	0,00	0,00
4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.501.980.000,00	1.501.980.000,00	0,00	0,00
4 1 2 03 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
4 1 2 03 02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1 2 03 04	Retribusi Izin Trayek	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	14.934.446.400,00	14.934.446.400,00	0,00	0,00
4 1 3 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD	8.819.761.100,00	8.819.761.100,00	0,00	0,00
4 1 3 01 01	PDAM Kota Madiun	6.004.282.100,00	6.004.282.100,00	0,00	0,00
4 1 3 01 02	BPR Bank Daerah Kota Madiun	2.121.736.400,00	2.121.736.400,00	0,00	0,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah /Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4 1 3 01 03	PD Aneka Usaha Kota Madiun	693.742.600,00	693.742.600,00	0,00	0.00
4 1 3 02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah Daerah Propin	6.114.685.300,00	6.114.685.300,00	0,00	0.00
4 1 3 02 01	BPD Bank Jatim	6.114.685.300,00	6.114.685.300,00	0,00	0.00
4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	116.808.055.000,00	116.808.055.000,00	0,00	0.00
4 1 4 01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0.00
4 1 4 01 09	Penjualan Hasil Perikanan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0.00
4 1 4 02	Jasa Giro	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0.00
4 1 4 02 01	Jasa Giro Kas Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0.00
4 1 4 03	Pendapatan Bunga Deposito	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00	0.00
4 1 4 03 01	Rekening Deposito pada Bank Bank Jatim	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00	0.00
4 1 4 07	Pendapatan Denda Pajak	0,00	0,00	0,00	0.00
4 1 4 07 01	Pendapatan Denda Pajak	0,00	0,00	0,00	0.00
4 1 4 07 02	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	0.00
4 1 4 12	Pendapatan dari Angsuran /Cicilan Penjualan	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	0.00
4 1 4 12 01	Angsuran /Cicilan Penjualan Bangunan	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	0.00
4 1 4 13	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0.00
4 1 4 13 01	Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0.00
4 1 4 14	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0.00
4 1 4 14 01	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0.00
4 1 4 15	Pendapatan BLUD	105.998.555.000,00	105.998.555.000,00	0,00	0.00
4 1 4 15 01	Perdapatan BLUD RSUD	95.000.000.000,00	95.000.000.000,00	0,00	0.00
4 1 4 15 02	Pendapatan BLUD Puskesmas	10.998.555.000,00	10.998.555.000,00	0,00	0.00
4 2	Dana Perimbangan	671.425.330.000,00	671.425.330.000,00	0,00	0.00
4 2 1	Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak	67.372.029.000,00	67.372.029.000,00	0,00	0.00
4 2 1 01	Bagi Hasil Pajak	22.423.248.000,00	22.423.248.000,00	0,00	0.00
4 2 1 01 01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	4.262.837.000,00	4.262.837.000,00	0,00	0.00
4 2 1 01 02	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang	18.160.411.000,00	18.160.411.000,00	0,00	0.00
4 2 1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak /Sumber Daya Alam	31.021.504.000,00	31.021.504.000,00	0,00	0.00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah /Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4 2 1 02 01	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	232.605.000,00	232.605.000,00	0,00	0.00
4 2 1 02 02	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	502.790.000,00	502.790.000,00	0,00	0.00
4 2 1 02 04	Bagi Hasil Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	29.920.114.000,00	29.920.114.000,00	0,00	0.00
4 2 1 02 05	Bagi Hasil Minerba	333.605.000,00	333.605.000,00	0,00	0.00
4 2 1 02 06	Bagi Hasil Sumber daya Alam Panas Bumi	32.390.000,00	32.390.000,00	0,00	0.00
4 2 1 03	Dana Bagi Hasil Cukai	13.927.277.000,00	13.927.277.000,00	0,00	0.00
4 2 1 03 01	Dana Bagi Hasil Cukai	13.927.277.000,00	13.927.277.000,00	0,00	0.00
4 2 2	Dana Alokasi Umum	527.916.797.000,00	527.916.797.000,00	0,00	0.00
4 2 2 01	Dana Alokasi Umum	527.916.797.000,00	527.916.797.000,00	0,00	0.00
4 2 2 01 01	Dana Alokasi Umum Murni Formula	513.066.617.000,00	513.066.617.000,00	0,00	0.00
4 2 2 01 02	Dana Alokasi Umum Tambahan Dana Kelurahan	9.450.000.000,00	9.450.000.000,00	0,00	0.00
4 2 2 01 03	Dana Alokasi Umum Penggajian P3K	5.400.180.000,00	5.400.180.000,00	0,00	0.00
4 2 3	Dana Alokasi Khusus	76.136.504.000,00	76.136.504.000,00	0,00	0.00
4 2 3 01	Dana Alokasi Khusus Reguler	6.388.026.000,00	6.388.026.000,00	0,00	0.00
4 2 3 01 09	Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana	736.900.000,00	736.900.000,00	0,00	0.00
4 2 3 01 21	Dana Alokasi Khusus Bidang Rujukan	2.507.656.000,00	2.507.656.000,00	0,00	0.00
4 2 3 01 23	Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan Dasar	1.084.937.000,00	1.084.937.000,00	0,00	0.00
4 2 3 01 24	DAK Penugasan Pengendalian Penyakit	2.058.533.000,00	2.058.533.000,00	0,00	0.00
4 2 3 03	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	69.748.478.000,00	69.748.478.000,00	0,00	0.00
4 2 3 03 02	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	4.685.400.000,00	4.685.400.000,00	0,00	0.00
4 2 3 03 03	Tunjangan Profesi Guru	57.695.529.000,00	57.695.529.000,00	0,00	0.00
4 2 3 03 04	Tambahan Penghasilan Guru	189.000.000,00	189.000.000,00	0,00	0.00
4 2 3 03 05	Bantuan Operasional Kesehatan	3.918.224.000,00	3.918.224.000,00	0,00	0.00
4 2 3 03 09	Bantuan Operasional KB	1.013.768.000,00	1.013.768.000,00	0,00	0.00
4 2 3 03 12	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	831.532.000,00	831.532.000,00	0,00	0.00
4 2 3 03 13	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	676.400.000,00	676.400.000,00	0,00	0.00
4 2 3 03 14	Pengawasan Obat dan Makanan	247.615.000,00	247.615.000,00	0,00	0.00
4 2 3 03 15	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	491.010.000,00	491.010.000,00	0,00	0.00
4 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	149.976.033.000,00	149.976.033.000,00	0,00	0.00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah /Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4 3 1	Pendapatan Hibah	19.399.600.000,00	19.399.600.000,00	0,00	0,00
4 3 1 06	Hibah Dana BOS	19.399.600.000,00	19.399.600.000,00	0,00	0,00
4 3 1 06 01	Dana Bos pada SDN 01 Kartoharjo	288.800.000,00	288.800.000,00	0,00	0,00
4 3 1 06 02	Dana Bos pada SDN 02 Kartoharjo	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00
4 3 1 06 03	Dana Bos pada SDN 03 Kartoharjo	66.400.000,00	66.400.000,00	0,00	0,00
4 3 1 06 04	Dana Bos pada SDN 01 Klegen	296.000.000,00	296.000.000,00	0,00	0,00
4 3 1 06 05	Dana Bos pada SDN 02 Klegen	121.600.000,00	121.600.000,00	0,00	0,00
4 3 1 06 06	Dana Bos pada SDN 03 Klegen	287.200.000,00	287.200.000,00	0,00	0,00
4 3 1 06 07	Dana Bos pada SDN 04 Klegen	85.600.000,00	85.600.000,00	0,00	0,00
4 3 1 06 08	Dana Bos pada SDN Oro oro Ombo	228.000.000,00	228.000.000,00	0,00	0,00
4 3 1 06 09	Dana Bos pada SDN 01 Rejomulyo	84.800.000,00	84.800.000,00	0,00	0,00
4 3 1 06 10	Dana Bos pada SDN 02 Rejomulyo	51.200.000,00	51.200.000,00	0,00	0,00
4 3 1 06 11	Dana Bos pada SDN 01 Kanigoro	92.800.000,00	92.800.000,00	0,00	0,00
4 3 1 06 12	Dana Bos pada SDN 02 Kanigoro	136.000.000,00	136.000.000,00	0,00	0,00
4 3 1 06 13	Dana Bos pada SDN 03 Kanigoro	143.200.000,00	143.200.000,00	0,00	0,00
4 3 1 06 14	Dana Bos pada SDN Sukosari	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00
4 3 1 06 15	Dana Bos pada SDN Pilangbango	184.000.000,00	184.000.000,00	0,00	0,00
4 3 1 06 16	Dana Bos pada SDN 01 Tawangrejo	133.600.000,00	133.600.000,00	0,00	0,00
4 3 1 06 17	Dana Bos pada SDN 02 Tawangrejo	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	0,00
4 3 1 06 18	Dana Bos pada SDN Kelun	141.600.000,00	141.600.000,00	0,00	0,00
4 3 1 06 19	Dana Bos pada SDN 01 Manguharjo	272.000.000,00	272.000.000,00	0,00	0,00
4 3 1 06 20	Dana Bos pada SDN 01 Nambangan Lor	248.000.000,00	248.000.000,00	0,00	0,00
4 3 1 06 21	Dana Bos pada SDN 02 Nambangan Lor	114.400.000,00	114.400.000,00	0,00	0,00
4 3 1 06 22	Dana Bos pada SDN 01 Madiun Lor	105.600.000,00	105.600.000,00	0,00	0,00
4 3 1 06 23	Dana Bos pada SDN 02 Madiun Lor	122.400.000,00	122.400.000,00	0,00	0,00
4 3 1 06 24	Dana Bos pada SDN 03 Madiun Lor	419.200.000,00	419.200.000,00	0,00	0,00
4 3 1 06 25	Dana Bos pada SDN 04 Madiun Lor	293.600.000,00	293.600.000,00	0,00	0,00
4 3 1 06 26	Dana Bos pada SDN 05 Madiun Lor	362.400.000,00	362.400.000,00	0,00	0,00
4 3 1 06 27	Dana Bos pada SDN 01 Nambangan Kidul	124.800.000,00	124.800.000,00	0,00	0,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4 3 1 06 28	Dana Bos pada SDN 02 Nambangan Kidul	164.200.000,00	164.200.000,00	0,00	0.00
4 3 1 06 29	Dana Bos pada SDN 03 Nambangan Kidul	247.200.000,00	247.200.000,00	0,00	0.00
4 3 1 06 30	Dana Bos pada SDN 04 Nambangan Kidul	122.400.000,00	122.400.000,00	0,00	0.00
4 3 1 06 31	Dana Bcs pada SDN 01 Winongo	277.600.000,00	277.600.000,00	0,00	0.00
4 3 1 06 32	Dana Bos pada SDN 02 Winongo	54.400.000,00	54.400.000,00	0,00	0.00
4 3 1 06 33	Dana Bos pada SDN Ngegong	197.800.000,00	197.800.000,00	0,00	0.00
4 3 1 06 34	Dana Bos pada SDN Patihan	288.800.000,00	288.800.000,00	0,00	0.00
4 3 1 06 35	Dana Bos pada SDN 01 Pangongangan	77.600.000,00	77.600.000,00	0,00	0.00
4 3 1 06 36	Dana Bos pada SDN 02 Pangongangan	256.800.000,00	256.800.000,00	0,00	0.00
4 3 1 06 37	Dana Bos pada SDN Sogaten	145.600.000,00	145.600.000,00	0,00	0.00
4 3 1 06 38	Dana Bos pada SDN 01 Taman	364.800.000,00	364.800.000,00	0,00	0.00
4 3 1 06 39	Dana Bos pada SDN 02 Taman	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	0.00
4 3 1 06 40	Dana Bos pada SDN 03 Taman	82.400.000,00	82.400.000,00	0,00	0.00
4 3 1 06 41	Dana Bos pada SDN 01 Pandean	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	0.00
4 3 1 06 42	Dana Bos pada SDN 02 Pandean	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	0.00
4 3 1 06 43	Dana Bos pada SDN Banjarejo	374.400.000,00	374.400.000,00	0,00	0.00
4 3 1 06 44	Dana Bos pada SDN 01 Mojorejo	109.600.000,00	109.600.000,00	0,00	0.00
4 3 1 06 45	Dana Bos pada SDN 02 Mojorejo	436.000.000,00	436.000.000,00	0,00	0.00
4 3 1 06 46	Dana Bos pada SDN 01 Manisrejo	283.200.000,00	283.200.000,00	0,00	0.00
4 3 1 06 47	Dana Bos pada SDN 02 Manisrejo	251.200.000,00	251.200.000,00	0,00	0.00
4 3 1 06 48	Dana Bos pada SDN 03 Manisrejo	145.600.000,00	145.600.000,00	0,00	0.00
4 3 1 06 49	Dana Bos pada SDN 04 Manisrejo	194.400.000,00	194.400.000,00	0,00	0.00
4 3 1 06 50	Dana Bos pada SDN 01 Demangan	130.400.000,00	130.400.000,00	0,00	0.00
4 3 1 06 51	Dana Bos pada SDN 02 Demangan	138.400.000,00	138.400.000,00	0,00	0.00
4 3 1 06 52	Dana Bos pada SDN 01 Josenan	149.600.000,00	149.600.000,00	0,00	0.00
4 3 1 06 53	Dana Bos pada SDN 02 Josenan	145.600.000,00	145.600.000,00	0,00	0.00
4 3 1 06 54	Dana Bos pada SDN 03 Josenan	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	0.00
4 3 1 06 55	Dana Bos pada SDN Kejuron	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0.00
4 3 1 06 56	Dana Bos pada Kuncen	68.800.000,00	68.800.000,00	0,00	0.00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah /Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4 3 1 06 57	Dana Bos pada SMP Negeri 1	1.303.000.000,00	1.303.000.000,00	0,00	0.00
4 3 1 06 58	Dana Bos pada SMP Negeri 2	744.000.000,00	744.000.000,00	0,00	0.00
4 3 1 06 59	Dana Bos pada SMP Negeri 3	573.000.000,00	573.000.000,00	0,00	0.00
4 3 1 06 60	Dana Bos pada SMP Negeri 4	886.000.000,00	886.000.000,00	0,00	0.00
4 3 1 06 61	Dana Bos pada SMP Negeri 5	462.000.000,00	462.000.000,00	0,00	0.00
4 3 1 06 62	Dana Bos pada SMP Negeri 6	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0.00
4 3 1 06 63	Dana Bos pada SMP Negeri 7	764.000.000,00	764.000.000,00	0,00	0.00
4 3 1 06 64	Dana Bos pada SMP Negeri 8	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0.00
4 3 1 06 65	Dana Bos pada SMP Negeri 9	439.000.000,00	439.000.000,00	0,00	0.00
4 3 1 06 66	Dana Bos pada SMP Negeri 10	518.000.000,00	518.000.000,00	0,00	0.00
4 3 1 06 67	Dana Bos pada SMP Negeri 11	651.000.000,00	651.000.000,00	0,00	0.00
4 3 1 06 68	Dana Bos pada SMP Negeri 12	723.000.000,00	723.000.000,00	0,00	0.00
4 3 1 06 69	Dana Bos pada SMP Negeri 13	725.000.000,00	725.000.000,00	0,00	0.00
4 3 1 06 70	Dana Bos pada SMP Negeri 14	376.000.000,00	376.000.000,00	0,00	0.00
4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	64.366.614.000,00	64.366.614.000,00	0,00	0.00
4 3 3 01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	64.366.614.000,00	64.366.614.000,00	0,00	0.00
4 3 3 01 01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	16.600.776.000,00	16.600.776.000,00	0,00	0.00
4 3 3 01 02	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.188.188.000,00	8.188.188.000,00	0,00	0.00
4 3 3 01 03	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	15.745.593.000,00	15.745.593.000,00	0,00	0.00
4 3 3 01 04	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	163.486.000,00	163.486.000,00	0,00	0.00
4 3 3 01 05	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	23.668.571.000,00	23.668.571.000,00	0,00	0.00
4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	65.095.240.000,00	65.095.240.000,00	0,00	0.00
4 3 4 01	Dana Penyesuaian	65.095.240.000,00	65.095.240.000,00	0,00	0.00
4 3 4 01 02	Dana Insentif Daerah	65.095.240.000,00	65.095.240.000,00	0,00	0.00
4 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.114.579.000,00	1.114.579.000,00	0,00	0.00
4 3 5 01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	1.114.579.000,00	1.114.579.000,00	0,00	0.00
4 3 5 01 01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Jawa Timur	1.114.579.000,00	1.114.579.000,00	0,00	0.00
	Jumlah Pendapatan	1.056.906.304.000,00	1.056.906.304.000,00	0,00	0.00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah /Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5	BELANJA	1.278.162.719.205,00	1.278.162.719.205,00	0,00	0.00
5 1	Belanja Tidak Langsung	464.944.240.577,00	464.944.240.577,00	0,00	0.00
5 1 1	Belanja Pegawai	424.570.731.577,00	424.570.731.577,00	0,00	0.00
5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	256.595.684.335,00	256.595.684.335,00	0,00	0.00
5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS /Uang Representasi	200.981.604.163,00	200.981.604.163,00	0,00	0.00
5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	15.063.119.930,00	15.068.119.930,00	0,00	0.00
5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	6.178.165.000,00	6.178.165.000,00	0,00	0.00
5 1 1 01 04	Tunjangan Fungsional	9.131.784.032,00	9.131.784.032,00	0,00	0.00
5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	2.933.184.000,00	2.933.184.000,00	0,00	0.00
5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	8.639.518.280,00	8.639.518.280,00	0,00	0.00
5 1 1 01 07	Tunjangan PPh /Tunjangan Khusus	436.192.146,00	436.192.146,00	0,00	0.00
5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	131.530.784,00	131.530.784,00	0,00	0.00
5 1 1 01 09	Iuran Asuransi Kesehatan, Kecelakaan dan Kematian	6.563.000.000,00	6.563.000.000,00	0,00	0.00
5 1 1 01 10	Uang Paket	57.582.000,00	57.582.000,00	0,00	0.00
5 1 1 01 11	Tunjangan Badan Musyawarah	21.011.000,00	21.011.000,00	0,00	0.00
5 1 1 01 12	Tunjangan Komisi	37.819.000,00	37.819.000,00	0,00	0.00
5 1 1 01 13	Tunjangan Badan Anggaran	21.011.000,00	21.011.000,00	0,00	0.00
5 1 1 01 14	Tunjangan Badan Kehormatan	5.664.000,00	5.664.000,00	0,00	0.00
5 1 1 01 16	Tunjangan Perumahan	2.956.200.000,00	2.956.200.000,00	0,00	0.00
5 1 1 01 18	Uang Jasa Pengabdian	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0.00
5 1 1 01 19	Tunjangan Reses	945.000.000,00	945.000.000,00	0,00	0.00
5 1 1 01 21	Tunjangan Badan Legislatif	14.799.000,00	14.799.000,00	0,00	0.00
5 1 1 01 22	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0.00
5 1 1 01 23	Tunjangan Transportasi	2.430.000.000,00	2.430.000.000,00	0,00	0.00
5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	101.279.314.714,00	101.279.314.714,00	0,00	0.00
5 1 1 02 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	0,00	79.434.764.714,00	79.434.764.714,00	0.00
5 1 1 02 09	Tambahan Penghasilan Guru	8.847.150.000,00	8.847.150.000,00	0,00	0.00
5 1 1 02 10	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif	92.432.164.714,00	12.997.400.000,00	(79.434.764.714,00)	(85.94)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah /Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5 1 1 03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH / WKDH	4.671.600.000,00	4.671.600.000,00	0,00	0,00
5 1 1 03 01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00	3.780.000.000,00	0,00	0,00
5 1 1 03 02	Belanja Penunjang Operasional KDH /WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00
5 1 1 03 03	Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	0,00
5 1 1 03 04	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00
5 1 1 05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	4.139.603.528,00	4.139.603.528,00	0,00	0,00
5 1 1 05 01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	4.139.603.528,00	4.139.603.528,00	0,00	0,00
5 1 1 07	Tunjangan Profesi Guru	57.884.529.000,00	57.884.529.000,00	0,00	0,00
5 1 1 07 01	Tunjangan Sertifikasi Guru PNSD	57.695.529.000,00	57.695.529.000,00	0,00	0,00
5 1 1 07 02	Tunjangan Non Sertifikasi Guru PNSD	189.000.000,00	189.000.000,00	0,00	0,00
5 1 4	Belanja Hibah	14.862.390.000,00	14.862.390.000,00	0,00	0,00
5 1 4 05	Belanja Hibah kepada Badan /Lembaga /Organisasi Masyarakat	14.862.390.000,00	14.862.390.000,00	0,00	0,00
5 1 4 05 01	Hibah kepada KORPRI	168.250.000,00	168.250.000,00	0,00	0,00
5 1 4 05 03	Hibah kepada KONI	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
5 1 4 05 04	Hibah kepada Pramuka	308.050.000,00	308.050.000,00	0,00	0,00
5 1 4 05 05	Hibah kepada PMI	2.348.054.000,00	2.348.054.000,00	0,00	0,00
5 1 4 05 06	Hibah kepada MUI	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
5 1 4 05 07	Hibah kepada BAZ	388.615.000,00	388.615.000,00	0,00	0,00
5 1 4 05 11	Hibah kepada Dewan Pendidikan	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00
5 1 4 05 15	Hibah Kepada GOW	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
5 1 4 05 16	Hibah Kepada Dharma Wanita	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
5 1 4 05 17	Hibah Kepada GOPTKI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
5 1 4 05 19	Hibah Pengamanan kepada Polresta	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00
5 1 4 05 20	Hibah Pengamanan kepada Kodim	179.955.000,00	179.955.000,00	0,00	0,00
5 1 4 05 28	Hibah Operasional PAUD (DAK)	4.685.400.000,00	4.685.400.000,00	0,00	0,00
5 1 4 05 34	Hibah kepada ORKEMAS/LSM	89.500.000,00	89.500.000,00	0,00	0,00
5 1 4 05 35	Hibah Kepada Den POM Pengamanan Terpadu	129.409.000,00	129.409.000,00	0,00	0,00
5 1 4 05 44	Hibah Kepada PGRI	142.000.000,00	142.000.000,00	0,00	0,00
5 1 4 05 50	Hibah LKP2TKA-TPA	1.586.400.000,00	1.586.400.000,00	0,00	0,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah /Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5 1 4 05 55	Hibah Kepada Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
5 1 4 05 56	Hibah Kepada Forum Kerukunan Umat Beragama	200.357.000,00	200.357.000,00	0,00	0,00
5 1 4 05 59	Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK)	676.400.000,00	676.400.000,00	0,00	0,00
5 1 4 05 60	Hibah Kepada Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BPMS) Kota Madiun	1.389.000.000,00	1.389.000.000,00	0,00	0,00
5 1 4 05 61	Hibah Kepada Perkumpulan Guru dan Pegawai Sekolah Swasta (PGPS)	151.000.000,00	151.000.000,00	0,00	0,00
5 1 5	Belanja Bantuan Sosial	21.248.848.000,00	21.248.848.000,00	0,00	0,00
5 1 5 02	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	10.181.524.000,00	10.181.524.000,00	0,00	0,00
5 1 5 02 01	Bantuan Sosial kepada Pengelola Tempat Ibadah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
5 1 5 02 04	Bantuan Sosial kepada Kelompok Pelayanan Lanjut Usia	577.800.000,00	577.800.000,00	0,00	0,00
5 1 5 02 07	Bantuan Operasional Sekolah Daerah Madrasah Diniyah (BOSDA Madin)	1.086.240.000,00	1.086.240.000,00	0,00	0,00
5 1 5 02 15	Bantuan Sosial Kepada Panti Asuhan	508.680.000,00	508.680.000,00	0,00	0,00
5 1 5 02 16	Bantuan Beasiswa Mahasiswa	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00
5 1 5 02 18	Bansos RTLH	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
5 1 5 02 19	Bantuan Beasiswa Mahasiswa Politeknik Madiun	432.000.000,00	432.000.000,00	0,00	0,00
5 1 5 02 20	Bantuan Beasiswa Mahasiswa Akademi Perkeretaapian Indonesia (API)	1.077.604.000,00	1.077.604.000,00	0,00	0,00
5 1 5 02 21	Bantuan Sosial Guru Non PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00
5 1 5 02 22	Bantuan Sosial Kepala,Guru TK,PAUD Non PNS	163.200.000,00	163.200.000,00	0,00	0,00
5 1 5 03	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	10.787.324.000,00	10.787.324.000,00	0,00	0,00
5 1 5 03 01	Bantuan Sosial kepada Perintis Kemerdekaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
5 1 5 03 05	Bantuan Sosial Pengabdian Tokoh Masyarakat	1.126.050.000,00	1.126.050.000,00	0,00	0,00
5 1 5 03 06	Jambanisasi	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
5 1 5 03 13	Bantuan Sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Daerah	4.355.640.000,00	4.355.640.000,00	0,00	0,00
5 1 5 03 14	Bantuan Sosial Guru dan Tenaga Kependidikan Swasta (PAUD, SD, SMP)	2.985.000.000,00	2.985.000.000,00	0,00	0,00
5 1 5 03 15	Bantuan Sosial Air	927.834.000,00	927.834.000,00	0,00	0,00
5 1 5 03 16	Bantuan Sosial Listrik	877.800.000,00	877.800.000,00	0,00	0,00
5 1 5 04	Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	0,00
5 1 5 04 01	Bantuan Sosial Akibat Bencana	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
5 1 5 04 08	Bantuan Orang Terlantar	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
5 1 7	Belanja Bantuan Keuangan	700.062.000,00	700.062.000,00	0,00	0,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah /Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5 1 7 05	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	700.062.000,00	700.062.000,00	0,00	0.00
5 1 7 05 01	Belanja Bantuan kepada Partai Demokrat	91.984.000,00	91.984.000,00	0,00	0.00
5 1 7 05 02	Belanja Bantuan kepada PDIP	144.969.000,00	144.969.000,00	0,00	0.00
5 1 7 05 03	Belanja Bantuan kepada Partai Gerindra	72.096.000,00	72.096.000,00	0,00	0.00
5 1 7 05 04	Belanja Bantuan kepada Partai Kebangkitan Bangsa	72.522.000,00	72.522.000,00	0,00	0.00
5 1 7 05 05	Belanja Bantuan kepada Partai Nasdem	48.728.000,00	48.728.000,00	0,00	0.00
5 1 7 05 06	Belanja Bantuan kepada Partai Golkar	54.199.000,00	54.199.000,00	0,00	0.00
5 1 7 05 07	Belanja Bantuan kepada Partai Amanat Nasional	15.832.000,00	15.832.000,00	0,00	0.00
5 1 7 05 08	Belanja Bantuan kepada Partai Keadilan Sejahtera	45.329.000,00	45.329.000,00	0,00	0.00
5 1 7 05 10	Belanja Bantuan kepada Partai Persatuan Pembangunan	22.079.000,00	22.079.000,00	0,00	0.00
5 1 7 05 11	Belanja Bantuan kepada Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	80.128.000,00	80.128.000,00	0,00	0.00
5 1 7 05 12	Belanja Bantuan kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	52.196.000,00	52.196.000,00	0,00	0.00
5 1 8	Belanja Tidak Terduga	3.562.209.000,00	3.562.209.000,00	0,00	0.00
5 1 8 01	Belanja Tidak Terduga	3.562.209.000,00	3.562.209.000,00	0,00	0.00
5 1 8 01 01	Belanja Tidak Terduga	3.562.209.000,00	3.562.209.000,00	0,00	0.00
5 2	Belanja Langsung	813.218.478.628,00	813.218.478.628,00	0,00	0.00
5 2 1	Belanja Pegawai	86.782.637.920,00	86.782.637.920,00	0,00	0.00
5 2 1 01	Honorarium PNS	56.391.218.836,00	56.391.218.836,00	0,00	0.00
5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.912.388.300,00	6.912.388.300,00	0,00	0.00
5 2 1 01 02	Honorarium Pelaksana Pengelola Keuangan dan Barang	270.122.000,00	270.122.000,00	0,00	0.00
5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	682.471.360,00	682.471.360,00	0,00	0.00
5 2 1 01 05	Uang Kinerja Kegiatan	48.526.237.176,00	48.526.237.176,00	0,00	0.00
5 2 1 02	Honorarium Non PNS	9.841.310.000,00	9.841.310.000,00	0,00	0.00
5 2 1 02 01	Honorarium Pegawai Honorrer /Tidak Tetap	9.811.310.000,00	9.811.310.000,00	0,00	0.00
5 2 1 02 02	Tambahan Penghasilan Pegawai Honorrer /Tidak Tetap	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0.00
5 2 1 03	Uang Lembur	4.823.938.000,00	4.823.938.000,00	0,00	0.00
5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	1.497.252.000,00	1.497.252.000,00	0,00	0.00
5 2 1 03 02	Uang Lembur Non PNS	3.326.686.000,00	3.326.686.000,00	0,00	0.00
5 2 1 05	Belanja Pegawai BLUD	13.156.490.584,00	13.156.490.584,00	0,00	0.00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah /Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5 2 1 05 01	Belanja Pegawai BLUD RSUD	9.586.900.000,00	9.586.900.000,00	0,00	0.00
5 2 1 05 02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	3.569.590.584,00	3.569.590.584,00	0,00	0.00
5 2 1 06	Belanja Pegawai BOS	2.569.680.500,00	2.569.680.500,00	0,00	0.00
5 2 1 06 01	Belanja Pegawai BOS	2.569.680.500,00	2.569.680.500,00	0,00	0.00
5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	440.432.411.684,00	440.132.411.684,00	(300.000.000,00)	(0.07)
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.481.359.514,00	20.481.359.514,00	0,00	0.00
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.323.429.405,00	6.323.429.405,00	0,00	0.00
5 2 2 01 02	Belanja Dokumen /Administrasi Tender	574.967.280,00	574.967.280,00	0,00	0.00
5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	2.974.361.926,00	2.974.361.926,00	0,00	0.00
5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	261.669.990,00	261.669.990,00	0,00	0.00
5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.912.224.475,00	1.912.224.475,00	0,00	0.00
5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas	919.427.900,00	919.427.900,00	0,00	0.00
5 2 2 01 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	54.181.000,00	54.181.000,00	0,00	0.00
5 2 2 01 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	0.00
5 2 2 01 09	Belanja Perlengkapan Olahraga	267.949.740,00	267.949.740,00	0,00	0.00
5 2 2 01 10	Belanja Bahan dan Alat Kesehatan	3.628.508.300,00	3.628.508.300,00	0,00	0.00
5 2 2 01 11	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	725.670.600,00	725.670.600,00	0,00	0.00
5 2 2 01 12	Belanja Barang Bukti /Uji /Sampel	74.742.000,00	74.742.000,00	0,00	0.00
5 2 2 01 13	Belanja Souvenir	1.040.544.540,00	1.040.544.540,00	0,00	0.00
5 2 2 01 14	Belanja Barang Penghargaan	321.587.280,00	321.587.280,00	0,00	0.00
5 2 2 01 15	Belanja Karangan Bunga	108.894.500,00	108.894.500,00	0,00	0.00
5 2 2 01 16	Belanja Peralatan Pemakaman	2.954.108,00	2.954.108,00	0,00	0.00
5 2 2 01 17	Belanja Perlengkapan (bendera,umbul-umbul,tumbai,asesoris lainnya)	1.286.776.470,00	1.286.776.470,00	0,00	0.00
5 2 2 02	Belanja Bahan /Material	9.820.028.908,00	9.820.028.908,00	0,00	0.00
5 2 2 02 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	500.336.600,00	500.336.600,00	0,00	0.00
5 2 2 02 02	Belanja Bahan /Bibit Tanaman	1.772.740.400,00	1.772.740.400,00	0,00	0.00
5 2 2 02 03	Belanja Bibit Temak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0.00
5 2 2 02 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.236.415.800,00	5.236.415.800,00	0,00	0.00
5 2 2 02 05	Belanja Bahan Kimia	230.575.000,00	230.575.000,00	0,00	0.00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah /Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5 2 2 02 06	Belanja Bahan Belajar Mengajar	1.195.783.408,00	1.195.783.408,00	0,00	0.00
5 2 2 02 07	Belanja Bahan Makanan	882.677.700,00	882.677.700,00	0,00	0.00
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	122.273.829.090,00	122.273.829.090,00	0,00	0.00
5 2 2 03 01	Belanja Telepon	815.199.544,00	815.199.544,00	0,00	0.00
5 2 2 03 02	Belanja Air	1.333.597.840,00	1.333.597.840,00	0,00	0.00
5 2 2 03 03	Belanja Listrik	17.228.626.830,00	17.228.626.830,00	0,00	0.00
5 2 2 03 04	Belanja Jasa Publikasi	5.944.530.536,00	5.944.530.536,00	0,00	0.00
5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar /Majalah	240.645.000,00	240.645.000,00	0,00	0.00
5 2 2 03 06	Belanja Kawat /Faksimili /Internet	9.164.700.000,00	9.164.700.000,00	0,00	0.00
5 2 2 03 07	Belanja Paket /Pengiriman	109.800.000,00	109.800.000,00	0,00	0.00
5 2 2 03 08	Belanja Sertifikasi	204.500.000,00	204.500.000,00	0,00	0.00
5 2 2 03 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0.00
5 2 2 03 10	Belanja Pembayaran Pajak & Iuran	1.746.638.700,00	1.746.638.700,00	0,00	0.00
5 2 2 03 11	Belanja Jasa Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	1.839.720.000,00	1.839.720.000,00	0,00	0.00
5 2 2 03 12	Belanja Uji Laboratorium	643.559.500,00	643.559.500,00	0,00	0.00
5 2 2 03 13	Belanja Jasa Hiburan	1.657.522.620,00	1.657.522.620,00	0,00	0.00
5 2 2 03 14	Belanja Jasa Tindakan Medis	2.937.500,00	2.937.500,00	0,00	0.00
5 2 2 03 15	Belanja Jasa Instalasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0.00
5 2 2 03 16	Belanja Jasa Pembuatan Materi Multimedia	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0.00
5 2 2 03 17	Belanja Jasa Biro Perjalanan	424.000.000,00	424.000.000,00	0,00	0.00
5 2 2 03 18	Belanja Jasa Kebersihan	423.505.000,00	423.505.000,00	0,00	0.00
5 2 2 03 19	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (EO)	7.669.426.974,00	7.669.426.974,00	0,00	0.00
5 2 2 03 20	Belanja Jasa Tenaga Ahli /Instruktur /Narasumber	13.905.796.200,00	13.905.796.200,00	0,00	0.00
5 2 2 03 21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	33.881.511.830,00	33.881.511.830,00	0,00	0.00
5 2 2 03 22	Belanja Jasa Kesenian	1.314.900.000,00	1.314.900.000,00	0,00	0.00
5 2 2 03 23	Belanja Jasa Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	23.482.211.016,00	23.482.211.016,00	0,00	0.00
5 2 2 03 24	Belanja Jasa Administrasi	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0.00
5 2 2 04	Belanja Premi Asuransi	4.495.174.228,00	4.495.174.228,00	0,00	0.00
5 2 2 04 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	2.971.880.960,00	2.971.880.960,00	0,00	0.00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah /Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5 2 2 04 05	Belanja Iuran BPJS Kesehatan	337.248.988,00	337.248.988,00	0,00	0.00
5 2 2 04 06	Belanja Iuran BPJS Ketenagaan	1.088.844.280,00	1.088.844.280,00	0,00	0.00
5 2 2 04 07	Belanja Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTD)	97.200.000,00	97.200.000,00	0,00	0.00
5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.178.230.080,00	9.178.230.080,00	0,00	0.00
5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	1.105.360.450,00	1.105.360.450,00	0,00	0.00
5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.011.650.650,00	2.011.650.650,00	0,00	0.00
5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Miryak /Gas dan Pelumas	5.332.256.550,00	5.332.256.550,00	0,00	0.00
5 2 2 05 04	Belanja Jasa KIR	21.256.200,00	21.256.200,00	0,00	0.00
5 2 2 05 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	697.605.350,00	697.605.350,00	0,00	0.00
5 2 2 05 07	Belanja Mutasi Kendaraan	10.100.880,00	10.100.880,00	0,00	0.00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.842.138.799,00	16.842.138.799,00	0,00	0.00
5 2 2 06 01	Belanja Cetak	14.155.524.325,00	14.155.524.325,00	0,00	0.00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	2.546.656.874,00	2.546.656.874,00	0,00	0.00
5 2 2 06 03	Belanja Dokumentasi	139.957.600,00	139.957.600,00	0,00	0.00
5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah /Gedung /Gudang /Parkir	4.742.982.350,00	4.742.982.350,00	0,00	0.00
5 2 2 07 01	Belanja Sewa Rumah Jabatan /Rumah Dinas	50.500.000,00	50.500.000,00	0,00	0.00
5 2 2 07 02	Belanja Sewa Gedung /Kantor /Tempat	3.860.407.230,00	3.860.407.230,00	0,00	0.00
5 2 2 07 03	Belanja Sewa Ruang Rapat /Pertemuan	702.445.000,00	702.445.000,00	0,00	0.00
5 2 2 07 04	Belanja Sewa Tempat Parkir /Uang Tambat /Hanggar Sarana Mobilitas	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0.00
5 2 2 07 05	Belanja Sewa Taman	125.880.120,00	125.880.120,00	0,00	0.00
5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.496.556.738,00	2.496.556.738,00	0,00	0.00
5 2 2 08 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.496.556.738,00	2.496.556.738,00	0,00	0.00
5 2 2 09	Belanja Sewa Alat Berat	9.840.000,00	9.840.000,00	0,00	0.00
5 2 2 09 03	Belanja Sewa Alat Berat Pertanian/Perkebunan	9.840.000,00	9.840.000,00	0,00	0.00
5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.945.014.572,00	7.945.014.572,00	0,00	0.00
5 2 2 10 01	Belanja Sewa Meja dan Kursi	750.856.010,00	750.856.010,00	0,00	0.00
5 2 2 10 02	Belanja Sewa Pakaian Adat /Tradisional	1.370.425.000,00	1.370.425.000,00	0,00	0.00
5 2 2 10 03	Belanja Sewa Tenda dan Perlengkapannya	3.572.312.312,00	3.572.312.312,00	0,00	0.00
5 2 2 10 04	Belanja Sewa Peralatan Makan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0.00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah /Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5 2 2 10 05	Belanja Sewa Sound System	1.318.449.210,00	1.318.449.210,00	0,00	0.00
5 2 2 10 06	Belanja Sewa Komputer dan Perengkapannya	837.500.000,00	837.500.000,00	0,00	0.00
5 2 2 10 07	Belanja Sewa Sarana Prasarana Pelatihan	91.472.040,00	91.472.040,00	0,00	0.00
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.079.268.426,00	39.079.268.426,00	0,00	0.00
5 2 2 11 01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	2.710.169.100,00	2.710.169.100,00	0,00	0.00
5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.484.385.560,00	8.484.385.560,00	0,00	0.00
5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	4.974.884.080,00	4.974.884.080,00	0,00	0.00
5 2 2 11 05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	21.950.018.516,00	21.950.018.516,00	0,00	0.00
5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	959.811.170,00	959.811.170,00	0,00	0.00
5 2 2 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.383.007.250,00	1.383.007.250,00	0,00	0.00
5 2 2 12 01	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	60.152.250,00	60.152.250,00	0,00	0.00
5 2 2 12 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	98.250.000,00	98.250.000,00	0,00	0.00
5 2 2 12 03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0.00
5 2 2 12 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	110.697.500,00	110.697.500,00	0,00	0.00
5 2 2 12 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	158.200.000,00	158.200.000,00	0,00	0.00
5 2 2 12 06	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0.00
5 2 2 12 07	Belanja Atribut Pakaian Dinas	896.707.500,00	896.707.500,00	0,00	0.00
5 2 2 13	Belanja Pakaian Kerja	349.578.000,00	349.578.000,00	0,00	0.00
5 2 2 13 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	349.578.000,00	349.578.000,00	0,00	0.00
5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	13.578.053.618,00	13.578.053.618,00	0,00	0.00
5 2 2 14 01	Belanja Pakaian KORPRI	2.539.500.000,00	2.539.500.000,00	0,00	0.00
5 2 2 14 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0.00
5 2 2 14 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4.127.400.000,00	4.127.400.000,00	0,00	0.00
5 2 2 14 04	Belanja Pakaian Olahraga	1.873.010.000,00	1.873.010.000,00	0,00	0.00
5 2 2 14 05	Belanja Pakaian Harian	1.436.453.120,00	1.436.453.120,00	0,00	0.00
5 2 2 14 06	Belanja Pakaian Pramuka	2.418.330.000,00	2.418.330.000,00	0,00	0.00
5 2 2 14 07	Belanja Pakaian Seragam Non Dinas	1.179.360.498,00	1.179.360.498,00	0,00	0.00
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.792.780.244,00	50.792.780.244,00	0,00	0.00
5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0.00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah /Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.908.437.802,00	30.908.437.802,00	0,00	0.00
5 2 2 15 03	Bantuan Transport	13.602.676.828,00	13.602.676.828,00	0,00	0.00
5 2 2 15 04	Belanja Akomodasi	6.281.665.614,00	6.281.665.614,00	0,00	0.00
5 2 2 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0.00
5 2 2 16 05	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0.00
5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.511.341.000,00	3.511.341.000,00	0,00	0.00
5 2 2 17 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat /Pelatihan	3.203.341.000,00	3.203.341.000,00	0,00	0.00
5 2 2 17 02	Belanja Sosialisasi	138.750.000,00	138.750.000,00	0,00	0.00
5 2 2 17 03	Belanja Bimbingan Teknis	169.250.000,00	169.250.000,00	0,00	0.00
5 2 2 20	Belanja Pemeliharaan	21.324.159.108,00	21.024.159.108,00	(300.000.000,00)	(1.41)
5 2 2 20 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	1.371.250.000,00	1.371.250.000,00	0,00	0.00
5 2 2 20 02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	144.900.000,00	144.900.000,00	0,00	0.00
5 2 2 20 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.796.433.768,00	12.496.433.768,00	(300.000.000,00)	(2.34)
5 2 2 20 04	Belanja Pemeliharaan Alat Perkantoran	3.061.163.800,00	3.061.163.800,00	0,00	0.00
5 2 2 20 05	Belanja Pemeliharaan sahuram, drainase /gorong-gorong	1.228.693.500,00	1.228.693.500,00	0,00	0.00
5 2 2 20 06	Belanja Pemeliharaan Mesin	1.302.854.800,00	1.302.854.800,00	0,00	0.00
5 2 2 20 07	Belanja Pemeliharaan Software	519.649.820,00	519.649.820,00	0,00	0.00
5 2 2 20 08	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran	101.220.000,00	101.220.000,00	0,00	0.00
5 2 2 20 11	Belanja Pemeliharaan Laundry	35.267.680,00	35.267.680,00	0,00	0.00
5 2 2 20 12	Belanja Pemeliharaan Alat lalu Lintas	144.801.800,00	144.801.800,00	0,00	0.00
5 2 2 20 14	Belanja Pemeliharaan Alat Studio /Komunikasi	236.568.000,00	236.568.000,00	0,00	0.00
5 2 2 20 15	Belanja Pemeliharaan Arsip dan Perpustakaan	219.451.940,00	219.451.940,00	0,00	0.00
5 2 2 20 16	Belanja Pemeliharaan Alat Persampahan	97.075.000,00	97.075.000,00	0,00	0.00
5 2 2 20 17	Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan	64.829.000,00	64.829.000,00	0,00	0.00
5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	10.742.187.454,00	10.742.187.454,00	0,00	0.00
5 2 2 21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	846.658.800,00	846.658.800,00	0,00	0.00
5 2 2 21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	6.347.697.710,00	6.347.697.710,00	0,00	0.00
5 2 2 21 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	581.600.000,00	581.600.000,00	0,00	0.00
5 2 2 21 04	Belanja Jasa Konsultansi Pengembangan Sistem Informasi	685.500.000,00	685.500.000,00	0,00	0.00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah /Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5 2 2 21 06	Belanja Jasa Konsultansi Hukum	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0.00
5 2 2 21 07	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	1.971.165.504,00	1.971.165.504,00	0,00	0.00
5 2 2 21 08	Belanja Jasa Konsultansi Penilai /Appraisal	109.565.440,00	109.565.440,00	0,00	0.00
5 2 2 22	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat /Pihak Ketiga	8.377.175.942,00	8.377.175.942,00	0,00	0.00
5 2 2 22 01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	8.320.353.910,00	8.320.353.910,00	0,00	0.00
5 2 2 22 02	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga	56.822.032,00	56.822.032,00	0,00	0.00
5 2 2 24	Belanja Software /Aplikasi Komputer	83.680.000,00	83.680.000,00	0,00	0.00
5 2 2 24 01	Belanja Software /Aplikasi Komputer	83.680.000,00	83.680.000,00	0,00	0.00
5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa BLUD	76.522.186.066,00	76.522.186.066,00	0,00	0.00
5 2 2 25 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD	68.576.772.000,00	68.576.772.000,00	0,00	0.00
5 2 2 25 02	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas	7.945.414.066,00	7.945.414.066,00	0,00	0.00
5 2 2 27	Belanja uang diberikan kepada Pihak Ketiga /Masyarakat	3.709.771.647,00	3.709.771.647,00	0,00	0.00
5 2 2 27 01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	195.500.000,00	195.500.000,00	0,00	0.00
5 2 2 27 02	Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	3.514.271.647,00	3.514.271.647,00	0,00	0.00
5 2 2 28	Belanja Barang dan Jasa BOS	12.586.068.650,00	12.586.068.650,00	0,00	0.00
5 2 2 28 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	12.586.068.650,00	12.586.068.650,00	0,00	0.00
5 2 3	Belanja Modal	286.003.429.024,00	286.303.429.024,00	300.000.000,00	0.10
5 2 3 02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	71.948.919.338,00	71.948.919.338,00	0,00	0.00
5 2 3 02 01	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar /Berat	5.981.850.000,00	5.981.850.000,00	0,00	0.00
5 2 3 02 02	Belanja Modal Alat Angkutan	10.534.387.000,00	10.534.387.000,00	0,00	0.00
5 2 3 02 03	Belanja Modal Alat Bengkel /Alat Ukur	41.435.000,00	41.435.000,00	0,00	0.00
5 2 3 02 04	Belanja Modal Alat Pertanian	116.175.000,00	116.175.000,00	0,00	0.00
5 2 3 02 05	Belanja Modal Alat Kantor /Rumah Tangga	47.436.066.338,00	47.436.066.338,00	0,00	0.00
5 2 3 02 06	Belanja Modal Peralatan Studio /Komunikasi	25.650.000,00	25.650.000,00	0,00	0.00
5 2 3 02 07	Belanja Modal Peralatan Kedokteran	5.095.856.000,00	5.095.856.000,00	0,00	0.00
5 2 3 02 08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium	68.900.000,00	68.900.000,00	0,00	0.00
5 2 3 02 10	Belanja Modal Peralatan Peralatan perlengkapan lalu lintas	2.648.600.000,00	2.648.600.000,00	0,00	0.00
5 2 3 03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	55.980.205.060,00	56.280.205.060,00	300.000.000,00	0.54
5 2 3 03 01	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	55.980.205.060,00	56.280.205.060,00	300.000.000,00	0.54

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah /Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5 2 3 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	150.785.620.060,00	150.785.620.060,00	0,00	0.00
5 2 3 04 01	Belanja Modal Jalan	73.454.996.000,00	73.454.996.000,00	0,00	0.00
5 2 3 04 02	Belanja Modal Jembatan	760.000.000,00	760.000.000,00	0,00	0.00
5 2 3 04 03	Belanja Modal Bangunan Air /Irigasi	76.291.646.560,00	76.291.646.560,00	0,00	0.00
5 2 3 04 04	Belanja Modal Instalasi dan Jaringan	278.977.500,00	278.977.500,00	0,00	0.00
5 2 3 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.625.764.296,00	2.625.764.296,00	0,00	0.00
5 2 3 05 01	Belanja Modal Pengadaan Buku Dan Kepustakaan	2.595.764.296,00	2.595.764.296,00	0,00	0.00
5 2 3 05 02	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Seri /Budaya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0.00
5 2 3 06	Belanja Modal Aset Lainnya	4.662.920.270,00	4.662.920.270,00	0,00	0.00
5 2 3 06 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Software	519.925.000,00	519.925.000,00	0,00	0.00
5 2 3 06 02	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud DED	2.034.500.000,00	2.034.500.000,00	0,00	0.00
5 2 3 06 03	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Studi Kelayakan (FS)	738.674.000,00	738.674.000,00	0,00	0.00
5 2 3 06 04	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rencana Induk /Master Plan	145.000.270,00	145.000.270,00	0,00	0.00
5 2 3 06 05	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Hasil Kajian	1.224.821.000,00	1.224.821.000,00	0,00	0.00
	Jumlah Belanja	1.278.162.719.205,00	1.278.162.719.205,00	0,00	0,00
	Surplus /Defisit	(221.256.415.205,00)	(221.256.415.205,00)	0,00	0,00
6	PEMBIAYAAN	221.256.415.205,00	221.256.415.205,00	0,00	0.00
6 1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	221.256.415.205,00	221.256.415.205,00	0,00	0.00
6 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	221.256.415.205,00	221.256.415.205,00	0,00	0.00
6 1 1 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	221.256.415.205,00	221.256.415.205,00	0,00	0.00
6 1 1 01 01	Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0.00
6 1 1 01 02	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0.00
6 1 1 01 03	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0.00
6 1 1 01 04	Belanja	221.256.415.205,00	221.256.415.205,00	0,00	0.00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	221.256.415.205,00	221.256.415.205,00	0,00	0,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	Pembiayaan Netto	221.256.415.205,00	221.256.415.205,00	0,00	0,00
6 3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pejabat Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001